BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu deskontruksi modern yang berwujud humanis serta syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah yaitu untuk mewujudkan terwujudnya peradaban usaha yang berwawasan teologi, transcendental, emansipatoris, dan humanis.[6]

Akuntansi syariah didefinisikan dengan proses mencat, mengklasifikasikan, meringkas transaksi keuangan yang diukurkan kedalam satuan uang dan laporan hasilnya mengacu prinsip syariah.[7]

Berdasarkan uraian diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya akuntansi syariah merupakan merupakan salah satu bidang akuntansi yang dalam pelaksanaannya mengacu prinsip syariah. Baik dari siklus pencatatan ataupun akuntansinya.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Sebenarnya akuntansi syariah secara filosofi bukan hanya suatu ilmu yang tercipta karena adanya pertentangan dengan teori

[6]Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),hal.104

[7]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu ,2012), hal 4.

akuntansi barat. Tetapi akuntansi syariah muncul untuk penyempurnaan teori akuntansi barat serta sebagai ikatan dari sistem mencatat kegiatan syariah suatu unit usaha bahkan tujuan akuntansi secara umum hampir sama dengan akuntansi konvensional. Berikut tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:[8]

a) Memberi penyediaan informasi keuangan yang dapat berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam pengambilan putusan
b) Untuk menambah kepatuhan pihak-pihak terkait akan prinsip syariah pada seluruh kegiatan dan transaksi bisnis
c) Untuk menetapkan hak serta kewajiban pihak bersangkutan. Baik hak dan kewajiban yang bersumber dari kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah maupun dari transaksi yang belum selesai.

c. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip umum akuntansi syariah terdiri dari tiga nilai yaitu nilai pertanggungjawaban, nilai kebenaran dan keadilan. Ketiga nilai tersebut selalu ada dalam dunia sistem akuntansi syariah.Adapun pemaparan ketiga prinsip umum akuntansi syariah yaitu:

a) Prinsip Pertanggungjawaban

Adalah nilai yang telah umum dikenal di kalangan masyarakat muslim . prinsip pertanggungjawaban ini selalu berhubungan

[8]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu ,2012), hal 104

dengan konsep amanah. Allah SWT menciptakan manusia selaku khalifah dimuka bumi. Dengan adanya pembebanan seorang manusia untuk melaksanakan kekhalifahannnya yang diberikan Allah SWT. Maksudnya menunaikan dan menjalankan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai proses pertanggungjawaban manusia selaku pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Dalam bisnis dan akuntansi berimplikasi bahwasanya seseorang yang melibatkan dalam praktik bisnis harus senantiasa memilki rasa tanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat dan diamanatkan pada pihak yang bersangkutan. Wujud pertanggungjawabannya adalah berupa laporan keuangan.[9]

a) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebetulnya tidak bisa lepas dari prinsip keadilan. Pada akuntansi kita akan senantiasa berhadapan dengan masalah pengukuran, pelaporan, dan pengakuan. Kegiatan ini bisa dijalankan secara baik jika didasarkan dari nilai kebenaran. Kebenaran ini akan bisa menumbuhkan keadilan dalam masalah pengakuan, pengukuran, serta pelaporan transaksi ekonomi.

[9]Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2005), hal 11.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah nilai yang selalu melekat pada fitrah manusia. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini adalah salah satu prinsip yang krusial dalam etika kelangsungan hidup bisnis dan sosial. Hal tersebut artinya setiap manusia mempunyai sifat untuk bertindak adil di setiap aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi adil berarti tiap transaksi yang dicatat perusahaan harus secara benar. Maka, dalam konteks akuntansi keadilan memiliki dua definisi, yaitu: pertama, yang berhubungan dengan kejujuran. Jika tidak adanya kejujuran informasi yang tersajikan oleh perusahaan akan sangat sulit dimengerti oleh masyarakat bahkan dapat merugikan masyarakat. Pengertian yang kedua ini lebih menjadi pendorong untuk menjalankan upaya yang membangun akuntansi modern ke arah akuntansi lebih baik.[10]

2. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan suatu proses keterbukaan terhadap semua masyarakat terkait proses pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Semua aturan yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara harus mudah

[10]Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, skripsi : "*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa"*, UniversitasDharma Yogyakarta. 2017, hal 30

diakses dengan memberikan cukup ruang kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi secara aktif didalamnya.[11]

Transparansi artinya menyampaikan informasi perihal proses penyelenggaraan dan juga pengelolaan pemerintah secara amanah dan terbuka kepada semua warga sesuai pertimbangan bahwa warga mempunyai hak buat mengetahui dan bisa mengakses informasi secara terbuka serta menyeluruh atas pertanggungjawaban.[12]

Transparansi adalah suatu tindakan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Dengan adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan masyarakat karena masyarakat bisa dengan mudah menerima informasi secara akurat dan benar. transparan bisa diartikan dengan suatu aktivitas keterbukaan kepada masyarakat terkait informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dari keberadaan transparansi ini dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat dengan pihak pemerintahan desa agar tidak akan ada masalah antara pemerintah desa dengan masyarakat.[13]

---

[11] Nico Adrianto, *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Governmen*, (Palangkaraya : Bayu Media, 200, hal 20

[12]Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, skripsi : "*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa"*, UniversitasDharma Yogyakarta. 2017, hal 30

[13]Sri Mulyanigsih, skripsi : *"Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan".* Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019, hal 6

Mengacu sejumlah pengertian transparansi tersebut sehingga didapatkan kesimpulan bahwasannya transparansi yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan informasi secara terbuka dari pemerintah untuk warga sehingga dapat menciptakan kepercayaan warga terhadap pemerintah dalam menyajikan informasi-informasi yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Transparansi Perspektif Akuntansi Syariah

Kategori transparansi pada perspektif islam yaitu (a) memberikan informasi harus disampaikan secara adil pada seluruh pihak yang memerlukan informasi (b) lembaga atau organisasi sifatnya terbuka pada semua pihak. Semua fakta yang berkaitan dengan kegiatan termasuk informasi keuangan semua pihak yang memerlukan informasi tersebut harus mudah mengaksesnya(c) pengungkapan informasi pula harus lengkap, benar, dan jujur.

Konsep transparansi dalam ajaran islam memiliki relevansi dengan sifat wajib Allah SWT yaitu shiddiq. Shiddiq artinya benar. Dalam konsep transparansi arti shiddiq yaitu menyampaikan informasi kepada pihak terkait dengan benardan jujur. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya:[14]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan benar”

[14]Tafsirq,*https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-70*,diakses 28 Desember 2021, pukul 15.00.

Ayat diatas mengandung arti bahwa harus selalu berkata jujur. Antara apa yang diniatkan dan diucapkan harus selaras. Dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dengan demikian pihak BUMDes harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena dengan adanya kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan pihak BUMDes.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah pada hambanya yang beriman supaya tetap taat kepada-Nya dengan cara menyembah-Nya sebagaimana seseorang dapat mengetahui-Nya serta tetap bertaqwa kepada-Nya, serta sebaiknya mereka harus mengucap perkataan secara jujur, benar, tidak menyimpang, tidak bengkok. Kemudian Allah membuat janji pada mereka apabila mereka melaksanakan semua perintah-Nya ini, Dia akan memberikan pahala untuk mereka namun harus melakukan perbaikan amal perbuatan mereka. Ialah Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menjalankan perbuatan yang baik, serta bahwa Allah akan memberikan ampunan kesalahan mereka yang telah lalu. Sementara kesalahan yang dilakukan mereka di waktu yang akan datang, akan Allah berikan ilham untuk mereka yang mau tobat dari-Nya.[15]

[15]Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*, (Bandung:Sinar Baru al-Gensindo,2002).

Nilai transparansi ini dituntut harus menanamkan nilai kejujuran. Kejujuran dalam memberikan informasi kepada pihak terkait. Sehubungan dengan nilai kejujuran dalam hadits Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas juga perkataan jujur. Dalam haditsnya berbunyi:[16]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

Dari‘ Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhuma, dia mengatakan:“ Rasûlullâh Shallallahu‘ alaihi wa sallam bersabda, “Hendaklah kamu senantiasa tidak berbohong atau jujur, sebab perilaku jujur akan membawa hal yang baik, serta hal yang baik membawakan seorang ke surga. Jika seseorang senantiasa berperilaku jujur serta senantiasa memilah kejujuran, hingga hendak dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Serta jauhi oleh kamu berperilaku dusta, sebab dusta bawa seorang kepada kejelekan, serta kejelekan membawakan seorang ke Neraka. Serta bila seorang tetap berdusta serta memilah kedustaan hingga hendak dicatat di sisi Allâh selaku pendusta (pembohong)”.

Berdasarkan hadits diatas, dapat diketahui bahwa kejujuran adalah sesuatu yang krusial dilakukan pada setiap aspek kelangsungan hidup . Salah satunya yaitu dalam transparansi. Dalam menerapkan prinsip transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran. Kejujuran dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh pihak terkait. Karena adanya kejujuran dapat menumbuhkan keyakinan atau kepercayaan antara pihak yang

[16]Almanhaj, *https://almanhaj.or.id/12601*, diakses pada 28 Desember 2021, pukul 15.30.

memberikan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.[17]

Al-Qaradhawi seorang cendekiawan muslim yang berasal dari mesir juga mengatakan bahwa prinsip kejujuran merupakan hal yang perlu diterapkan dalam transaksi bisnis.[18] Prinsip kejujuran dalam perusahaan atau lembaga dapat terwujud dalam nilai-nilai transparansi.

c. Indikator Transparansi

Pengukuran transparansi bisa dilakukan dengan sejumlah indikator yakni:[19]

1) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen

Dengan keberadaan ketersediaan aksesibilitas dokumen dapat memudahkan masyarakat untuk memahami informasi yang diperlukan. Baik dalam bentuk dokumen yang tertulis maupun gambar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan dana desa yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintahan.

2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Adanya informasi yang jelas dan lengkap merupakan sesuatu yang sangatlah penting untuk masyarakat mengetahuinya. kejelasan dan kelengkapan informasi dimaksudkan guna memberi informasi secara jelas dan lengkap mengenai

[17]Almanhaj, *https://almanhaj.or.id/12601*, diakses pada 28 Desember 2021, pukul 15.30.
[18]Yusuf al-Qaradhâwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
[19]Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hal 73

keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam memberiinformasi ke masyarakat, pemerintah desa harus menyampaikan informasi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan secara transparan. Bentuk transparansi yang dilakukan aparat desa yaitu dengan memasang pengumuman dipapan informasi yang berisi tentang jadwal kegiatan yang sedang terlaksana. Selain itu masyarakat dan pemerintah desa juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.[20] Karena masyarakat dan aparat pemerintah berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa.

3) Adanya keterbukaan proses

Maksud dari keterbukaan proses yaitu pemerintah harus secara terbuka terhadap seluruh masyarakat terkait proses pengelolaan dana. Karena hal ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2.[21] Undang-undang ini menegaskan mengenai keterbukaan informasi publik. Didalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa badan publik atau pemerintah harus menyajikan atau menyediakan informasi-informasi secara benar, jujur, serta tidak membuat tersesat. Karena semua masyarakat berhak

[20]Alan Pusida, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.7, No. 108, Tahun 2021.

[21]Indonesia(1), *Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No.14 Tahun 2008, ps.7

untuk memahami seluruh proses pengaturan dana secara keseluruhan dan transparan.

4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yaitu suatu kerangka yang harus dilalui oleh suatu lembaga baik bank maupun non bank untuk melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya. Dalam menjalalankan tugas, fungsi dan kewenangannya suatu lembaga harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan atau yang telah berlaku saat ini. Regulasi tentang pengelolaan dana desa telah ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Disamping itu, pemerintah pula harus menyajikan laporan terkait perincian anggaran dana desa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung agar informasi tersebut lebih akurat.

d. Dimensi Transparansi

Pelaksanaan Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap pelaksanaannya, serta selalu menerima kritikan dan saran yang diberikan dan dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Transparansi mempunyai dimensi. Dimensi transparansi antara lain:[22]

1) Invormativeness (informatif)

[22]Mardiasmoro, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:Andi,2009), hal 19

Dalam memberikan informasi, penjelasan, berita, prosedur, data kepada masyarakat atau publik harus secara jelas dan akurat. Indikator informatif yaitu:

a) Tepat waktu

   Laporan keuangan haruslah dilaporkan tepat waktu. Biasanya laporan keuangan disajikan setiap akhir periode. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

b) Memadai

   Dalam menyajikan laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang diberlakukan meliputi pengungkapan informatif secara memadai atas suatu hal yang material[23]

c) Jelas

   Informasi-informasi yang disajikan haruslah jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait agar kesalahpahaman bisa diminimalisir

d) Akurat

   Informasi-informasi yang disajikan harus terhindar dari kekeliruan-kekeliruan atau ketidakvalidan agar tidak

[23] Adianto Asdi, Ronny Gosal, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, ejournal.unsrad.ac.id, diakses tanggal 2 Januari 2022

membuat tersesat pemakai yang memperoleh informasi tersebut.

e) Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan diharapkan bisa dibandingkan antara lembaga yang sejenis dan periode waktunya. Laporan keuangan bisa berguna untuk memperbandingkan kinerja lembaga serta lembaga lainnya sejenis

f) Mudah diakses

Harus memudahkan semua pihak dalam mengakses informasi. Supaya pihak-pihak terkait bisa dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2) Disclousure (Pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud yaitu pengungkapan laporan keuangan terhadap publik atau masyarakat atas kinerja dan aktivitas finansial yang telah terjadi.[24]

a) Kondisi keuangan

Kondisi atau tampilan secara utus atas kondisi keuangan lembaga atau organisasi dalam kurun waktu atau periode tertentu.Dimana kondisi keuangan ini menampilkan sehat ataukah tidak keuangan suatu lembaga yang sebenarnya

[24]Mardiasmoro, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:Andi,2014),hal 52

b) Susunan pengurus

Susunan pengurus ini merupakan komponen-komponen dalam organisasi. Dengan adanya susunan pengurus dalam suatu lembaga menunjukkan terdapat pemisahan kerja serta memperlihatkan bagaimana aktivitas-aktivitas atau fungsi-fungsi yang bervariasi tersebut dapat dikoordinasikan bersama

c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Agar dapat mewujudkan hasil sesuai keinginan, suatu lembaga atau organisasi harus membuat suatu perencanaan. Perencanaan ini nantinya akan membantu suatu lembaga atau organisasi untuk pengambilan keputusan yang paling baik yang sesuai dengan tujuan suatu lembaga tersebut.[25]

e. Prinsip-prinsip Transparansi

Untuk mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip dari transparansi. Ada enam (6) prinsip dalam transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam yaitu sebagai berikut:[26]

1) Terdapatnya informasi-informasi yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diaksesnya. Informasi-

[25]Ait Novatiani, *Pengaruh Transparansi dan AKuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*, Jurnal Ilmu Managemen dan Bisnis, Vol.10, No.1, Tahun 2019.

[26]Liong Tundunaung, *"Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud"*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, hal 4

informasi tersebut tentang bentuk program atau bantuan, proses pelaksanaan, cara pelaksanaan, dan informasi data.

2) Terdapat informasi-informasi yang diterbitkan dan terdapatnya media seperti website untuk akses informasi-informasi.
3) Terdapatnya laporan berkala beserta bukti atau dokumen terkait penggunaan SDM untuk mengembangkan proyek yang mudah diakses oleh publik atau umum
4) Terdapatnya laporan tahunan terkait laporan keuangan dan penerapan aktivitas-aktivitas yang telah dijalankan oleh desa disertai adanya bukti atau dokumen
5) Terdapatnya media sosial seperti website ataupun media lainnya yang dipakai untuk menerbitkan aktivitas-aktivitas yang dijalankan lembaga atau organisasi. Sehingga publik atau umum dapat mengetahuinya dengan mudah

3. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yaitu laporan yang membahas mengenai catatan informasi keuangan sebuah perusahaan atau lembaga. Laporan keuangan mencakup laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.[27] Catatan atas laporan keuangan bisa tersajikan dengan berbagai metode atau cara, contohnya disajikan

[27] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), hal.2

dalam bentuk laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini adalah elemen integral dari laporan keuangan. Selain itu pula dikategorikan segmen geografis dan industri serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan keuangan ialah hasil dari proses akuntansi yang bisa berguna sebagai media atau alat guna mengkomunikasikan data keuangan ataupun semua kegiatan yang terjadi diperusahaan dari pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak yang memiliki kepentingan terkait data serta semua aktifitas yang ada diperusahaan tersebut.[28]

Laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai laporan yang menggambarkan suatu posisi keuangan mulai dari sistem pembukuan selama satu periode tertentu yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat komunikasi.

Berdasarkan uraian diatas didapatkan kesimpulan bahwa laporan keuangan yaitu hasil akhir proses akuntansi selama satu periode yang didalamnya meliputi laporan laba rugi, neraca, posisi keuangan dan laporan perubahan modal dan arus kas. Dimana laporan keuangan ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan diakhir periode.

[28]Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta:Liberty,2014), hal.2

b. Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan bisa dinyatakan baik apabila laporan keuangan tersebut sesuai dengankarakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan harus baik karena berguna bagi pemakai informasi. Karakteristik laporan keuangan ada empat yakni diantaranya.[29]

1) Dapat dibandingkan

Klien bisa memperbandingkan laporan anggaran perusahaan antar periode untuk identifikasi kecenderungan kinerja dan posisi keuangan.

2) Keandalan

Informasi mempunyai kualitas andal apabila terbebas dari kesalahan material, pemahaman yang menyesatkan serta pengguna bisa diandalkan sebagai gambaran yang sah atau asli tentang apa yang harusnya disajikan atau apa yang dianggap normal untuk dibandingkan.

3) Relevan

Data harus relevan untuk mengatasi masalah klien dalam proses mengambil keputusan. Data mempunyai kualitas yang signifikan apabila bisa memberi pengaruh keputusan ekonomi klien dalam membantu mereka dengan survei peristiwa masa

[29]Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia,2015)

depan atau masa lalu, memperbaiki atau mengkonfirmasi dampak dari keputusan masa lalau mereka.

4) Dapat dipahami

Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari mudahnya untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut dimana pengguna laporan keuangan tersebut harus mempunyai pengetahuan secara cukup memadai terkait aktifitas ekonomi dan bisnis dan akuntansi. Pemakai laporan keuangan juga harus mempunyai kesediaan untuk memelajari informasi secara tekun.

Akan tetapi, informasi kompleks yang harusnya masuk ke dalam laporan keuangan tidak bisa dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwasanya informasi tersebut terlalu sukar untuk bisa dimengerti oleh pengguna tertentu.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan yaitu diantaranya:[30]

1) Memberi informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu.
2) Memberi informasi mengenai terjadinya perubahan pada pasiva, modal, dan aktiva perusahaan
3) Memberi informasi mengenai jenis biaya dan jumlah biaya yang perusahaan keluarkan selama suatu periode

[30]Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Bank,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013),hal 11

4) Memberi informasi mengenai jumlah dan jenis modal dan kewajiban yang dipunyai perusahaan sekarang ini.
5) Memberi informasi mengenai jumlah dan jenis pemasukan yang diperoleh selama beberapa waktu tertentu
6) Memberi informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva yang dipunyai perusahaan sekarang ini
7) Informasi keuangan lain sebagainya.

d. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Secara umum terdapat 5 bentuk jenis laporan keuangan dalam praktiknya yakni:

1) Neraca

Laporan neraca adalah laporan secara sistematis mengenai posisi keuangan perusahaan di tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud ialah posisi jenis dan jumlah harta atau aktiva serta passiva yaitu utang dan modal sebuah perusahaan.[31] . Laporan neraca yakni bentuk laporan keuangan yang dimanfaatkan sebagai pegangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan pada akhir periode. Komponen-komponen yang terdapat pada laporan neraca yaitu:[32]

a. Aktiva

[31]Jusup Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta:YKPN,2011), hal 291

[32]Ivana, *Laporan Neraca bagi Perusahaan dan 3 Komponen Penting didalamnya*, konsultanku.co.id, pada tanggal 23 Desember 2021, pukul 11.30.

Aktiva merupakan harta yang dipunyai perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan.

b. Kewajiban

Kewajiban atau liabilitas merupakan sesuatu yang terutang yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan yang terjadi karena adanya pembelian secara kredit. Kewajiban dibagi dalam dua macam yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban lancar.

c. Modal

Modal atau ekuitas adalah sejumlah uang yang disetor oleh pemilik perusahaan untuk menunjang operasional perusahaaan.

Bentuk Laporan Neraca yakni berikut ini:

Tabel 2.5 Laporan Posisi Keuangan

Nama Perusahaan Neraca Periode			
Asset	xxx	Kewajiban Ekuitas	xxx xxx
Total asset	xxx	Total kewajiban dan ekuitas	xxx

2) Laporan laba rugi

Merupakan suatu laporan keuangan yang mencerminkan hasil bisnis perusahaan selama satu periode.[33]Dimana pada laporan laba rugi ini menjabarkan unsur-unsur yang berpengaruh pada hasil usaha perusahaan yaitu unsur beban

[33]Sirait Pirmatua, *Analisis Laporan Keuangan*,(Yogyakarta:Ekuilibra,2017), hal 20.

dan pendapatan. Dengan penjabaran adanya pendapatan dan beban, suatu perusahaan akan mengetahui laba ataupun rugi yang diraih perusahaan selama waktu tertentu.

Bentuk Laporan Laba Rugi yaitu:

Tabel 2.6 Laporan Laba Rugi

Nama Perusahaan Laporan Laba Rugi Periode		
Pendapatan	xxx	
Total pendapatan		xxx
Beban	xxx	
Total beban		(xxx)
Laba / Rugi Bersih		xxx

3) Laporan Perubahan Modal

Adalah suatu laporan keuangan yang berisikan jenis dan jumlah modal yang dipunyai perusahaan sekarang ini.[34]Laporan perubahan modal memberikan informasi-informasi terkait adanya perubahan modal yang disebabkan oleh laba atau rugi yang diperoleh perusahaan serta semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemilik modal.

Bentuk Laporan Perubahan Modal yaitu berikut ini:

Tabel 2.7 Laporan Perubahan Modal

Nama Perusahaan Laporan Perubahan Modal Periode		
Modal Awal		xxx
Ditambah		
Setoran modal	xxx	
Laba Bersih (jika ada)	xxx	xxx

[34]Hery, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 1*, (Yogyakarta: Central For Academic Publising Services,2015), hal 5.

Dikurangi			
Prive	xxx		
Rugi (jika rugi)		xxx	(xxx)
Modal akhir periode			xxx

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ialah laporan keuangan dengan menampilkan seluruh sudut pandang yang menyangkut aktivitas organisasi baik yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kas. Laporan arus kas ini menyajikan uang tunai masuk serta keluar sebuah perusahaan.

Komponen-komponen yang terdapat pada laporan arus kas yakni:[35]

a. Arus kas dari kegiatan operasi

Arus kas ini merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang dijalankan perusahaan. Terjadinya transaksi dalam kegiatan operasional biasanya berupa pemasukan maupun penmgeluaran.

b. Arus kas dari kegiatan investasi

Arus kas ini bersumber dari kegiatan penanaman modal yang berhubungan dengan pembelian maupun penjualan dari aktiva yang dimiliki perusahaan.

[35]Jurnal Entrepreneur, *Laporan Arus Kas: Pengertian, Cara Pembuatan & Contohnya,* jurnal.id, pada tanggal 23 Desember 2021, pukul 11.30.

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan

Arus kas ini bersumber dari kegiatan pendanaan yang berhubungan dengan modal serta utang perusahaan tersebut.

Bentuk Laporan Arus Kas yaitu berikut ini:

Tabel 2.8 Laporan Arus Kas

Nama Perusahaan Laporan Arus Kas Periode	
Aktivitas Operasional	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	xxx
Arus kas bersih dari investasi	xxx
Arus kas bersih dari pendanaan	xxx
Kenaikan atau penurunan kas bersih	xxx
Saldo kas awal periode	xxx
Saldo kas akhir periode	xxx

5) Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan yang memberikan informasi-informasi tambahan pada isi laporan keuangan serta informasi-informasi yang membutuhkan penjelasan tertentu. Hal tersebut dijalankan supaya pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak salah ketika menerjemahkan laporan keuangan tersebut.[36]

4. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Suatu lembaga usaha yang terdapat di desa yang dikelola oleh pemerintahan desa serta masyarakat guna menguatkan perekonomian desa sertauntuk membangun kedekatan sosial

[36]Jusup Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, , (Yogyakarta:YKPN,2011), hal 481.

masyarakat dengan pemerintah desa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dibentuk sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang terdapat di desa tersebut.[37]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu suatu badan usaha yang sebagian atau seluruh dananya dipunyai oleh desa lewat pernyertaan secara langsung bersumber dari aset desa yang dipisah untuk pengelolaan jasa pelayanan, aset dan usaha lain yang semaksimal mungkin untuk kemakmuran warga desa. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3 yang mengatur tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi yang dana usahanya dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat yang mengikuti asas mandiri.[38]

b. Ciri-ciri BUMDes

Ada tujuh ciri utama yang membandingkan BUMDes dan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yakni:

1. Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha ini merupakan milik desa yang ditangani secara bersama masyarakat desa
2. Modal usaha berasal dari modal desa dan masyarakat. Modal dari desa sebanyak 15% serta oleh masyarakat sebanyak 49%

[37]Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal 35

[38]Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

3. Dalam kegiatan operasionalnya BUMDes berpegang teguh kepada falsafah bisnis budaya lokal yang ada di desa
4. Semua unit usaha yang didirikan berlandaskan kemampuan desa masing-masing
5. Laba yang didapat semata-mata untuk kemakmuran masyarakat
6. Mendapat jaminan fasilitas langsung dari Pemerintah
7. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dibawah naungan pemerintah[39]

c. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Ada enam (6) prinsip pengelolaan BUMDes yakni:

1. Sustainable

   Aktivitas usaha harus dilestarikan dan dikembangkan oleh warga untuk sebagai wadah BUMDes

2. Akuntabel

   Semua aktivitas yang dilakukan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi ataupun teknis

3. Transparan

   Semua kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat harus dipahami oleh warga secara mudah, terbuka.

4. Emansipatif

[39]Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal.51

Seluruh komponen yang ada di BUMDes harus mendapat perlakuan sama tidak ada yang membeda-bedakan suku, agama, serta golongan.

5. Partisipatif

   Seluruh komponen yang ada di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberi kontribusi dan dukungan untuk kemajuan BUMDes

6. Kooperatif

   Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bisa bekerja sama secara baik guna mengembangkan usahanya.[40]

d. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

   Tujuan dibentuknya BUMDes diantaranya:

1. Sebagai perintis untuk aktivitas usaha di desa
2. Melaksanakan kemanfaatan umum meliputi ketersediaan jasa bagi hajat hidup warga desa
3. Menaikan perekonomian asli desa
4. Untuk menumbuhkan perekonomian desa

Berikut tujuan dibentuknya BUMDes diantaranya:

1. Menambah kreativitas masyarakat desa dalam berwirausaha
2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha sektor informal supaya bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa

[40]Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 13

3. Menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa
4. Menambah peran masyarakat desa untuk mengelola potensi yang terdapat di desa sebagai sumber pendapatan lainnya secara sah.[41]

e. Peran BUMDes

Peran BUMDes untuk masyarakat desa antara lain:

1. Menunjang dalam meningkatkan penghasilan masyarakat desa
2. Menciptakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia
3. Memiliki peran aktif dalam rangka memajukan mutu kelangsungan hidup manusia dan masyarakat
4. Memperkuat ekonomi masyarakat desa
5. Menciptakan dan mengembangkan kemampuan dan potensi perekonomian masyarakat desa, secara tidak langsung guna mempertinggi kemakmuran ekonomi masyarakat desa.[42]

B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari sejumlah penelitian terdahulu berguna untuk menjadi bahan penguat, perbandingan, dan referensi tambahan dari penelitian ini, yakni berikut ini:

---

[41]Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat* Desa, (Lombok Timur : Makalah BPMPD,2004), hal.17

[42]Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa,* (Yogyakarta: UPP STM YKPN,2003), hal.13

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati[43], bertujuan untuk meneliti proses tranparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa, baik secara respons ataupun pengakuan dari masyarakat. Metode yang dipakai ialah penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini ialah praktik dari akuntansi yang sifatnya transparan berbentuk laporan keuangan yang dipunyai oleh BUMDes serta pihak Kantor Desa Karangbendo saat membuat pelaporan pertambahan aset yang dipunyai oleh lembaga yang berpanduan "Buku Data Tanah Di Desa atau Kelurahan Asal Kabupaten". Persamaannya adalah melakukan penelitian terhadap proses transparansi laporan keuangan. Sedangkan perbedaannya pada obyek dan subyek penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian yang dijabarkan.

Hasil temuan dari Murtianingsih,[44]tujuannya untuk meneliti transparansi tata kelola laporan keuangan BUMDes dari laporanpendapatan Desa Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu belum dilaksanakannya transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Rejo Makmur. Hal tersebut didukung dengan pernyataan sejumlah narasumber misal bendahara desa dan kepala desa. Persamaannya adalah melakukan penelitian terhadap proses transparansi

[43]Dina Irawati dan Diana Elvianita, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 28 Oktober 2017

[44]Sri Murtianingsih dan Diyah Probowulan, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Rejo Makmur pada Pelaporan Pendapatan Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. September 2021

laporan keuangan. Sedangkan perbedaannya pada obyek dan subyek penelitian yang beda dengan hasil penelitian yang diuraikan.

Penelitian yang dilaksanakan Wardiana,[45]tujuannya untuk meneliti pemahaman tentang prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini membahas terkait prinsip transparansi tata kelola keuangan Aisyiyah Cabang Kesamben ditunjukkan pada tahap dalam mencatat dan melaporkan keuangan. Persamaannya yaitu mempelajari tentang prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaannya pada obyek dan subyek penelitian yang beda dengan hasil penelitian yang diuraikan.

Hasil temuan dari Herianti,[46]tujuannya untuk meneliti transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran desa di Kec. Palakka Kab. Bone ditinjau dari perspektif keuangan syariah. Jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan sosiologis. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa di Kecamatan Palakka telah akuntabilitas dan transparan walaupun belum seluruhnya optimal serta sudah berdasarkan konsep kemaslahatan umat namun harus paruh dengan nilai-nilai islam. Persamaannya yaitu mempelajari tentang transparansi dan juga ditinjau dari perspektif syariah. Sedangkan

---

[45]Natasya Wardiana dan Sawitri Prastiti, *Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben Blitar*, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, No. 3, Januari 2016

[46]Herianti dan Arifin, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam*, Jurnal Al-Tsarwah, Vol. 3, No.1, Juni 2020

perbedaannya pada obyek dan subyek penelitian yang beda dengan hasil penelitian yang diuraikan.

Penelitian yang dilaksanakan Sangki,[47]tujuannya agar dapat memahami bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Tandu Kec. Lolak Kab. Bolang Mongondow. Peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis membuktikan bahwa tidak terdapatnya transparansi atau keterbukaan terkait pengelolaan anggaran pemerintah desa sehingga masyarakat tidak memahami secara rinci mengenai APBDes. Persamaannya yaitu untuk melihat seberapa transparan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaannya pada obyek dan subyek penelitian yang tidak sama dengan hasil penelitian yang diuraikan.

Kelebihan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini meninjau transparansi laporan keuangan dalam perspektif akuntansi syariah. Sehingga dalam penelitian ini lebih banyak dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadits dan pendapat ulama agar penelitian ini relevan dengan akuntansi syariah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu rangkaian konsep hubungan dimana peneliti yang merumuskannya dengan cara meninjau hasil penelitian serta teori yang telah disusun.

[47]Adianto Sangki, Ronny Gossal dan Josef Kairupan, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Mongondow)*, Vol. 1, No.1, 2017

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

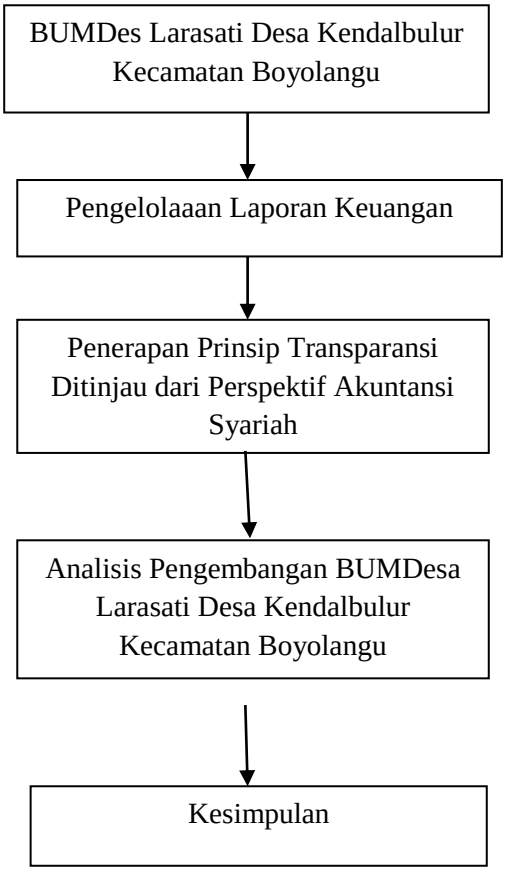

Keterangan :

BUMDes dapat dikatakan baik jika BUMDes dapat mengatur pengelolaan keuangannya dengan baik. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dimata publik dalam pengelolaan keuangannya apakah sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya. Dalam akuntansi syariah transparansi dapat terlihat dalam hal kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangannya. Dengan adanya kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMDes. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes